

**LAPORAN PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN NAGARI
AKHIR TAHUN ANGGARAN 2018**



**NAGARI LUNANG KECAMATAN LUNANG
KABUPATEN PESISIR SELATAN
TAHUN 2019**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan nikmat kesehatan dan kesempatan, sehingga kami dapat menyelesaikan Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari (LPPN) Nagari Lunang Kecamatan Lunang Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2018.

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari (LPPN) Nagari Lunang Kecamatan Lunang Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2018, ini merupakan bahan evaluasi dan tolok ukur dalam menentukan Rencana Kegiatan Tindak Lanjut, bagi Nagari Lunang Tiga khususnya dan pada umumnya sebagai bahan kebijakan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan dalam menentukan program dan kegiatan pada Tahun Anggaran berikutnya.

Dalam penyampaian Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari (LPPN) ini, kami telah berusaha semaksimal mungkin, terkait dengan proses Penyelenggaraan Pemerintahan dan atau penyelenggaraan pelayanan terhadap masyarakat di Nagari Lunang Kecamatan Lunang Kabupaten Pesisir Selatan pada tahun 2018, baik di bidang pelayanan administrasi, pembangunan fisik maupun bidang pembangunan non fisik.

Kami pun menyadari bahwa pada prakteknya dalam proses pemenuhan kebutuhan masyarakat sesuai dengan target yang ditentukan dalam RPJM Nagari dan RKP Nagari, kami banyak menghadapi kendala, sehingga hasil yang dicapai masih jauh dari sempurna. Hal tersebut tentu saja tidak terlepas dari kelemahan dan kekurangan kami yang masih banyak membutuhkan arahan bimbingan serta pembinaan dari pihak terkait.

Dalam Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari (LPPN) yang kami sampaikan masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu kami membutuhkan koreksi, arahan dan kebijakan inovatif yang pada Tahun Anggaran berikutnya akan membimbing kami pada perubahan yang positif dalam penyelenggaraan pemerintahan dan atau penyelenggaraan pelayanan terhadap masyarakat, menuju Nagari Lunang Sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi berbasis potensi lokal dan Menjadi Nagari terkemuka di Wilayah Selatan di Kabupaten Pesisir Selatan, serta Menjadi pusat pertumbuhan Ekonomi di bagian Selatan Sumatera Barat

Wali Nagari Lunang



ADI CANDRA

DAFTAR ISI

SAMPUL

PENGANTAR ii

DAFTAR ISI iii

I. PENDAHULUAN

 A. TUJUAN 1

 B. VISI MISI..... 1

 C. STRATEGI DAN KEBIJAKAN 2

II. PROGRAM KERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN NAGARI..... 2

III. PROGRAM KERJA PELAKSANAAN PEMBANGUNAN 3

IV. PROGRAM KERJA PEMBINAAN KEMASYARAKATAN 4

V. PROGRAM KERJA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT 5

VI. PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NAGARI 6

 A. PERATURAN NAGARI TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NAGARI TAHUN ANGGARAN 2018..... 6

 B. PERATURAN NAGARI TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NAGARI TAHUN ANGGARAN 2018 6

VII. KEBERHASILAN, PERMASALAHAN DAN SOLUSI 7

VIII. PENUTUP

 A. KESIMPULAN 7

 B. SARAN 7

LAMPIRAN-LAMPIRAN

- 1. Peraturan Nagari Tentang Laporan Pertanggungjawaban Akhir Tahun Anggaran 2018
 - Rincian Anggaran PendapatanNagari Tahun 2018
 - Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun2018
 - Rincian Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun 2018
- 2. Keputusan BAMUS Laporan Akhir Tahun Anggaran 2018
- 3. Berita Acara Nota Kesepakatan BAMUS dan Pemerintah Nagari.
- 4. Rincian Realisasi Kegiatan Dana PAN
- 5. Rincian Realisasi Kegiatan Dana ADD
- 6. Rincian Realisasi Kegiatan Dana DDS
- 7. Rincian Realisasi Kegiatan Dana PBH
- 8. Rincian Realisasi Kegiatan Dana PBK
- 9. Rincian Realisasi Kegiatan Dana DLL
- 10. Laporan Semester II
- 11. Laporan Kekayaan Nagari
- 12. Laporan PMK 225
- 13. LaporanRekapitulasiJumlahPendudukpadaakhirbulanDesember 2018.

LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN NAGARI LUNANG AKHIR TAHUN ANGGARAN 2018

I. PENDAHULUAN

A. TUJUAN

Pelaporan merupakan salah satu mekanisme untuk mewujudkan dan menjamin akuntabilitas pengelolaan keuangan Nagari, sebagaimana ditegaskan dalam asas Pengelolaan Keuangan Nagari (Asas Akuntabel). Hakikat dari pelaporan ini adalah Pengelolaan Keuangan Nagari dapat dipertanggungjawabkan dari berbagai aspek: Hukum, administrasi, maupun moral. Pelaporan pengelolaan keuangan Nagari menjadi kewajiban Pemerintah Nagari sebagai bagian tak terpisahkan dari penyelenggaraan pemerintahan Nagari.

Pelaporan sebagai salah satu alat pengendalian untuk:

1. Mengetahui kemajuan pelaksanaan kegiatan, dan
2. Mengevaluasi berbagai aspek (hambatan, masalah, factor-faktor berpengaruh, keberhasilan, dan sebagainya) terkait pelaksanaan kegiatan pemerintah Nagari.

B. VISI DAN MISI

Visi adalah suatu Gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang diinginkan dengan melihat potensi dan kebutuhan Nagari, penyusun Visi Nagari LUNANG ini dilakukan dengan pendekatan partisipatif, melibatkan pihak-pihak yang berkepentingan di Nagari sejahtera seperti pemerintah Nagari, Bamus Nagari, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Lembaga Masyarakat Nagari dan masyarakat Nagari pada umumnya. Pertimbangan kondisi eksternal di Desa seperti satuan kerja wilayah pembangunan di Kecamatan, Maka berdasarkan pertimbangan di atas Visi Nagari LUNANG adalah :

Mewujudkan Masyarakat Nagari Lunang yang Lebih Sejahtera dan Mandiri dalam Menjalankan kehidupan yang Mempunyai Masa Depan yang Cerah, Imteq, Iptek, dan Tetap Memelihara Adat dan Budaya, Sumber Daya Alam yang Ada dengan Berbasis Pembangunan dan Pengembangan Komoditi Unggulan seperti : Sawit, Karet, Jagung, Padi dan Lain-Lain.

1. MISI

Selain penyusunan Visi juga telah ditetapkan misi-misi yang memuat sesuatu pernyataan yang harus dilaksanakan oleh desa agar tercapainya Visi desa tersebut. Visi berada diatas misi. Pernyataan Visi kemudian dijabarkan ke dalam Misi agar dapat di operasionalkan / dikerjakan. Sebagai penyusunan Visi. Misi pun dalam penyusunannya menggunakan pendekatan partisipatif dan pertimbangan potensi dan kebutuhan Nagari LUNANG sebagaimana Proses yang dilakukan maka misi Nagari LUNANG adalah :

- Meningkatkan/Membangun Jalan-jalan Usaha Tani sehingga semua Petani tidak Kesulitan Membawa Hasil Taninya.
- Membangun Masyarakat yang berkualitas dan berdaya saing.
- Membangun Perekonomian yang kokoh.
- Mewujudkan Lunang yang indah, nyaman, aman dan manusiawi.
- Mengokohkan kehidupan social kemasyarakatan melalui peningkatan Peran Pemuda, Olahraga, seni dan budaya dalam

bingkai kearifan lokal.

C. STRATEGI DAN KEBIJAKAN

Hasil analisa oleh tim perumus bersama dengan Pemerintah Nagari kelembagaan Nagari serta Masyarakat Nagari Lunang pada umumnya telah menghasilkan rumusan yang mana rumusan tersebut didapatkan dari hasil pengkajian Nagari dimulai dari menjaring aspirasi masyarakat mulai dari level paling rendah sampai pada tingkatan paling atas yaitu hasil identifikasi dan sinkronisasi dari Rencana jangka menengah Daerah (RPJMD) kabupaten Pesisir Selatan serta penjabaran Visi Misi Nagari .Dari hasil pengkajian Nagari tersebut didapatkan masalah utama atau isu strategis dalam pelaksanaan pembangunan yang dilakukan Oleh Nagari Lunang adalah:

- a. Belum memadainya sarana prasarana Nagari seperti infrastruktur jalan,pendidikan maupun ekonomi,kesehatan dan komunikasi.
- b. Masih rendahnya Kapasitas perangkat Nagari dalam penyelenggaraan Pemerintah Nagari.
- c. Peningkatan kelembagaan Ekonomi Nagari
- d. Kapasitas Kelembagaan Nagari Masih Rendah
- e. Belum ada fasilitas akses informasi Nagari berbasis Teknologi
- f. Terbatasnya pembinaan generasi muda Nagari
- g. Kesejahteraan Masyarakat masih sangat rendah.
- h. kurangnya partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan Nagari.

II. PROGRAM KERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN NAGARI

Rencana Program Kerja Penyelenggaraan Pemerintah Nagari berdasarkan RKPNagari sebagai berikut :

- 1. Siltap dan Tunjangan
- 2. Operasional Kantor Nagari
- 3. Tunjangan BAMUS
- 4. Operasional BAMUS
- 5. Pengadaan Peralatan Kantor
- 6. Operasional raskin
- 7. Operasional Pemungutan PBB-P2
- 8. Perencanaan Pembangunan Nagari
- 9. Penyelenggaraan Musyawarah Nagari
- 10. Pengadaan Kendaraan Dinas
- 11. Lanjutan Pembangunan Pagar dan Plafon Aula Kantor Nagari
- 12. Pemeliharaan Taman Dan Banguna

Program Kerja Penyelenggaraan Pemerintah Nagari yang dilaksanakan berdasarkan RKPNagari sebagai berikut :

- 1. Penghasilan tetap dan tunjangan Wali Nagari dan perangkat
- 2. Kegiatan oprasional perkantoran
- 3. Tunjangan BAMUS
- 4. Kegiatan Oprasional BAMUS
- 5. Penyelenggaraan Musyawarah Nagari
- 6. Perencanaan Pembangunan Nagari
- 7. Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- 8. Pemeliharaan Gedung Kantor
- 9. Operasional Raskin
- 10. Intensifikasi Pemungutan PBB
- 11. Pengelolaan Keuangan dan Aset Nagari

III. PROGRAM KERJA PELAKSANAAN PEMBANGUNAN

Rencana Program Kerja Pelaksanaan Pembangunan Nagari berdasarkan RKP Nagari sebagai berikut :

- 1. Pembangunan Gedung Posyandu Lengkap Sarana dan Prasarana Kesehatan
- 2. Pembangunan Lokal MDA
- 3. Pengerasan Jalan Usaha Tani Rey 11
- 4. Cor Jalan Tengah Ujung Lanjutan
- 5. Cor Jalan Makam
- 6. Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kesehatan
- 7. Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Pendidikan
- 8. Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Taman Bacaan
- 9. Kegiatan Penghijauan dan Pelestarian Lingkungan
- 10. Pemeliharaan Sarana-Prasana Masyarakat
- 11. Pembangunan Sarana Air Bersih
- 12. Pembangunan Jembatan
- 13. Pembangunan Ekonomi Produktif
- 14. Pembangunan dan Pemeliharaan Rumah Tidak Layak huni

Program Kerja Pembangunan Nagari yang dilaksanakan berdasarkan RKP Nagari sebagai berikut :

- 1. Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kesehatan
- 2. Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Pendidikan
- 3. Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Taman Bacaan
- 4. Kegiatan Penghijauan dan Pelestarian Lingkungan
- 5. Pemeliharaan Sarana-Prasana Masyarakat
- 6. Pembangunan Sarana Air Bersih
- 7. Pembangunan Jembatan
- 8. Pembangunan Ekonomi Produktif
- 9. Pembangunan dan Pemeliharaan Rumah Tidak Layak huni

IV. PROGRAM KERJA PEMBINAAN KEMASYARAKATAN

Program Kerja Pembinaan Kemasyarakatan Nagari yang dilaksanakan berdasarkan RKP Nagari sebagai berikut :

- 1. Pembinaan PKK Nagari
- 2. Pembinaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Nagari
- 3. Pembinaan Lembaga KAN
- 4. Pembinaan SATLINMAS Nagari
- 5. Pembinaan Pemuda dan Olahraga
- 6. Pelaksanaan Hari - Hari Besar Kebangsaan

Program Kerja Pembinaan Kemasyarakatan Nagari yang dilaksanakan berdasarkan RKP Nagari sebagai berikut :

- 1. Kegiatan Pembinaan Organisasi Perempuan/PKK
- 2. Kegiatan Pembinaan Lembaga Adat
- 3. Kegiatan Pembinaan LPMN

V. PROGRAM KERJA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

Rencana Program Kerja Pemberdayaan Masyarakat Nagari yang dilaksanakan berdasarkan RKP Nagari sebagai berikut :

- 1. Pelatihan Wali Nagari dan Perangkat Nagari
- 2. Kegiatan Peningkatan Kapasitas Lembaga Masyarakat

3. Pemberdayaan Kader Nagari
4. Pelatihan Teknologi Tepat Guna
5. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat
6. Pemberdayaan Pendidikan dan Kebudayaan
7. Pemberdayaan TP-PKK Nagari
8. pengelolaan informasi nagari
9. Pendataan dan penyusunan Profil Nagari
10. Pemberdayaan Posyandu, UP2K dan BKB, PMT

Program Kerja Pemberdayaan Masyarakat Nagari yang dilaksanakan berdasarkan RKP Nagari sebagai berikut :

1. Kegiatan Pelatihan Kepala Desa dan Perangkat
2. Kegiatan Peningkatan Kapasitas Lembaga Masyarakat
3. Kegiatan Pemberdayaan Posyandu, UP2K dan BKB, PMT
4. Kegiatan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat
5. Kegiatan Pemberdayaan TP-PKK Nagari
6. Kegiatan Pelayanan Pendidikan dan Kebudayaan
7. Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi
8. Kegiatan Penyusunan Profil Desa / Data Desa
9. Kegiatan Pemasyarakatan Olahraga

VI. PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NAGARI

A. PERATURAN NAGARI TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NAGARI TAHUN ANGGARAN 2016

Pelaksanaan Aggaran Pendapatan dan Belanja Nagari telah ditetapkan dengan Peraturan Nagari Lunang Nomor 3 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2018. sebagaimana telah dirubah keperaturan Nagari Lunang Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Lunang Tahun Anggaran 2018, dengan (*Rincian Anggaran Pendapatan Nagari Tahun 2018*)

Anggaran pendapatan dan belanja Nagari Tahun Anggaran 2018 sebagai berikut :

1.	<i>Pendapatan Nagari</i>	<i>Rp.</i>	1.558.342.000,00
2.	<i>Belanja Nagari</i>	<i>Rp.</i>	1.564.260.798,68
	<i>a. Bidang penyelenggraan Pemerintah Nagari</i>	<i>Rp.</i>	485.679.807,42
	<i>b. Bidang Pembnagunan</i>	<i>Rp.</i>	757.321.831,45
	<i>c. Bidang pembinaan Kemasyarakatan</i>	<i>Rp.</i>	57.425.267,18
	<i>d. Bidang pemberdayaan Kemasyarakatan</i>	<i>Rp.</i>	263.833.892,63
	<i>Surplus/Defisit</i>	<i>Rp.</i>	5.918.798,68
3.	<i>Pembiayaan Nagari</i>		
	<i>a. Penerimaan Pembiayaan</i>	<i>Rp.</i>	35.918.798,68
	<i>b. Pengeluaran Pembiayaan</i>	<i>Rp.</i>	30.000.000,00

B. PERATURAN NAGARI TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NAGARI TAHUN ANGGARAN 2018

Peraturan Nagari Lunang Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pertanggunjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun 2018,*dengan Rincian Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun 2018.*

VII. KEBERHASILAN, PERMASALAHAN DAN SOLUSI

Adapun keberhasilan dan permasalahan serta solusi yang muncul dalam penyelenggaraan pemerintahan di Nagari Lunang, dapat diurai dalam tabel dibawa ini :

NO	BIDANG	KEBERHASILAN YANG DICAPAI	PERMASALAHAN YANG DIHADAPI	SOLUSI/ UPAYA YANG DITEMPUH
1	BIDANG PELAKSANAAN PEMERINTAHAN NAGARI	1. Penghasilan tetap dan tunjangan Wali Nagari dan perangkat 2. Kegiatan oprasional perkantoran 3. Tunjangan BAMUS 4. Kegiatan Oprasional BAMUS 5. Penyelenggaraan Musyawarah Nagari 6. Perencanaan Pembangunan Nagari 7. Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 8. Pemeliharaan Gedung Kantor 9. Operasional Raskin 10. Intensifikasi Pemungutan PBB 11. Pengelolaan Keuangan dan Aset Nagari 12. Operasional Linmas Nagari	1. Kurangnya Skill (Pengetahuan) Aparat Nagari 2. Minimnya kesadaran Masyarakat dalam Pembayaran PBB	1. Membutuhkan pembinaan secara berkelanjutan 2. Pentingnya sosialisasi dalam pembayaran PBB
2.	BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN	1. Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kesehatan 2. Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Pendidikan 3. Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Taman Bacaan 4. Kegiatan Penghijauan dan Pelestarian Lingkungan 5. Pemeliharaan Sarana-Prasana Masyarakat 6. Pembangunan Sarana Air Bersih 7. Pembangunan Jembatan 8. Pembangunan Ekonomi Produktif 9. Pembangunan dan Pemeliharaan Rumah Tidak Layak huni	Minimnya dana nagari guna mencukupi semua target pembangunan yang direncanakan oleh nagari.	Perlu adanya pendapatan dari sumber – sumber lain selain dana transfer.
3.	BIDANG PEMBINAAN	1. Kegiatan Pembinaan Organisasi Perempuan /PKK	1. Belum adanya sosialisasi mengenai	Perlu adanya sosialisasi dan

	KEMASYARAKATAN	2. Kegiatan Pembinaan Lembaga Adat 3. Kegiatan Pembinaan LPMN	adat istiadat 2. Dana pembinaan lembaga kurang memadai	pemahaman terkait dengan tugas lembaga.
4	BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	1. Kegiatan Pelatihan Kepala Desa dan Perangkat 2. Kegiatan Peningkatan Kapasitas Lembaga Masyarakat 3. Kegiatan Pemberdayaan Posyandu, UP2K dan BKB, PMT 4. Kegiatan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat 5. Kegiatan Pemberdayaan TP-PKK Nagari 6. Kegiatan Pelayanan Pendidikan dan Kebudayaan 7. Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi 8. Kegiatan Penyusunan Profil Desa / Data Desa 9. Kegiatan Pemasarakatan Olahraga	1. Perlu adanya pembinaan organisasi kepemudaan. 2. Perlu adanya profil nagari yang valid. 3. Kurangnya pemahaman materi pelatihan peningkatan SDM	1. Perlu adanya dana lebih guna peningkatan kelembagaan pemuda. 2. Perlu adanya pendataan dari pintu ke pintu 3. Membutuhkan pelatihan peningkatan yang berlanjut

VIII. PENUTUP

A. KESIMPULAN

Mengacu pada Premendagri Nomor 46 Tahun 2016 tentang Laporan Wali Nagari, pada pasal 3 poin 1 “*Laporan penyelenggaraan pemerintah Desa Akhir Tahun Anggaran disampaikan oleh kepala Desa kepada Bupati/walikota melalui camat secara tertulis paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran*”.

Laporan dan Pertanggungjawaban adalah babakan terakhir dalam siklus Pengelolaan Keuangan Nagari. Maka kami menyampaikan hal-hal pokok simpulan sebagaimana terurai dalam laporan ini :

1. Dasar Hukum Pelaporan Pertanggungjawaban Akhir Tahun
2. Tahapan perencanaan yang merujuk pada RKP Nagari Lunang
3. Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Program kegiatan Nagari Lunang tahun anggaran 2018 berdasarkan APB Nagari
4. Capaian keberhasilan, masalah dan penyelesaian masalah yang terjadi di Nagari Lunang.

B. UCAPAN TERIMA KASIH

Tak lupa kami sampaikan banyak terimakasih kepada unsur yang terlibat membantu dalam penyelesaian Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari Lunang Akhir Tahun Anggaran 2018. Baik dari Pemerintah Kabupaten, kecamatan, Perangkat Nagari Lunang.

C. SARAN

Demi kelancaran Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari sebagaimana diatur Permendagri Nomor 46 Tahun 2016 tentang Laporan Wali Nagari, maka kami dari pemerintah Nagari menyarankan agar Kabupaten / Dinas terkait untuk meningkatkan kapasitas aparat Nagari, terkhusus pengelola keuangan dan Tim Penyusun LPPN di Nagari.

Demikian Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari Akhir Tahun Anggaran 2018 ini dibuat sebagai bahan seperlunya.

Lunang, 11 Maret 2019

WALI NAGARI LUNANG



PEMERINTAH KABUPATEN
WALI NAGARI
LUNANG
KEC. LUNANG
PESISIR SELATAN
ADI CANDRA